

Urgensi Organisasi Pemuda Muhammadiyah dalam Politik dan Hukum di Jakarta

Abdur Rahim^{1,*}, , Ma'mun Murod Al-Barbasy², , Andi Hermansyah¹, 
dan Zainal Muksin¹, 

¹ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 15419, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia

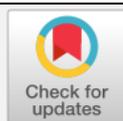
² Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 15419, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia

* Korespondensi: abdur.rahim@student.umj.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Rahim, A., Al-Barbasy, M. M., Hermansyah, A., & Muksin, Z. (2022). *The Urgency of the Muhammadiyah Youth Organization in Politics and Law in Jakarta*. *Society*, 10(2), 517-524.

DOI: [10.33019/society.v10i2.434](https://doi.org/10.33019/society.v10i2.434)

Hak Cipta © 2022. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota organisasi untuk menggunakan haknya dalam kehidupan politik sesuai dengan semua pernyataannya. Hak pilih harus dipertanggungjawabkan sebagai warga negara yang bertindak rasional dan tegas, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi bangsa dan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena sosial mengenai peran psikiater dalam pembuktian kekerasan psikis dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sumber data penelitian adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemuda Muhammadiyah memilih untuk berjuang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui upaya mengembangkan atau memberdayakan umat untuk mencapai masyarakat madani yang sekuat cita-cita Muhammadiyah untuk mencapai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, hal-hal yang berkaitan dengan politik negara sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintah akan ditempuh melalui pendekatan yang tepat dan bijaksana sesuai dengan prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara demokrasi yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai kelembagaan.

Dikirim: 30 September, 2022;
Diterima: 14 November, 2022;
Dipublikasi: 30 Desember, 2022;

Kata Kunci: Hukum; Muhammadiyah; Organisasi; Politik

1. Pendahuluan

Pembahasan dan kajian tentang Muhammadiyah dan politik memang tidak ada habisnya karena jika berbicara tentang Muhammadiyah salah satunya adalah tentang politik. Namun, banyak pro dan kontra terkait keikutsertaan Muhammadiyah dalam partai politik atau keterlibatannya dalam politik di Indonesia.

Misalnya, Syafi'i Ma'arif menulis tentang teologi politik Muhammadiyah, yang menafsirkan politik dengan pendekatan teologis yang erat kaitannya dengan agama dan melihat bahwa Muhammadiyah memiliki peran atau pandangan penting terkait isu-isu politik kenegaraan. Teologi yang jelas tidak bisa dipisahkan dari unsur agama mau tidak mau harus dijadikan acuan oleh Muhammadiyah dalam hal politik (Maarif, 2015).

Ketika ada agenda politik nasional yang saat itu dibutuhkan, muncul tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti K.H. Mas Mansyur, tokoh Muhammadiyah pendiri Partai Islam Indonesia, Ki Bagus Hadikusumo, yang berperan aktif di Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan Kasman Singodimedjo yang merupakan tokoh perintis dan elit Muhammadiyah dalam politik. Padahal, keterlibatan mereka di panggung politik berangkat dari kapasitasnya (Effendy, 2015).

Di bidang politik, Muhammadiyah berusaha mengikuti *Khittah* dan proporsi kebenarannya. Muhammadiyah harus membuktikan bahwa teori konseptual itu nyata dan tidak bisa diakses. Islam, bahwa konstitusi dalam negara membutuhkan pemahaman politik dan hukum. Sejalan dengan itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadian organisasi Muhammadiyah di bidang politik, yang merupakan bagian dari gerakan di masyarakat dan dilakukan oleh lembaga dan aturan yang berlaku di Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Amal Islam dalam segala bentuk gerakan politik dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Minimnya perkembangan umat Islam Indonesia dalam soal kehidupan menyangkut pencarian solusi. Jika umat Islam kurang berkembang pemahamannya maka organisasi harus menjadi salah satu sumber utama terciptanya tatanan sosial.

2. Metodologi Penelitian

Melihat uraian sebelumnya, maka persoalan ini dapat dititikberatkan pada betapa urgennya pemahaman politik dan hukum dalam menghadapi Organisasi Pemuda Muhammadiyah di Jakarta. Sifat deskriptif dari penelitian ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena sosial mengenai peran psikiater dalam pembuktian kekerasan psikis dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi dasar penulisan ini, yang menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier yang dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keterlibatan Muhammadiyah dalam Pergerakan Nasional dijelaskan oleh Shobron (2003) bahwa mulai tahun 1918 Muhammadiyah mendirikan kependuan yang diberi nama Hisbul Wathan yang berarti Pembela Tanah Air. Dalam kependuan, K.H. rajin menanamkan

kesadaran berbangsa. Ahmad Dahlan, cinta tanah air, disiplin dalam kerja keras, ikhlas dalam berjuang, serta meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Sejarah mencatat tokoh-tokoh Muhammadiyah berjasa bagi bangsa. Salah satunya, Jenderal Sudirman, seorang kader Muhammadiyah, membuktikan kiprahnya dengan memimpin perang gerilya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Kemudian, Insinyur fenomenal Juanda, seorang tokoh Muhammadiyah yang menjadi penggagas Deklarasi Juanda 1957, mendorong untuk menyatukan laut ke dalam kepulauan Indonesia secara kokoh sehingga menjadi negara yang berintegritas dan kesatuan yang utuh.

Meski demikian, posisi Muhammadiyah sebagai organisasi, termasuk ketika masih menjadi anggota istimewa pada Partai Masyumi, tidak pernah menjadikan urusan politik sebagai hal yang krusial dalam upaya amalnya. Bachtiar Effendy dalam bukunya “Keharusan Tajdid Politik Muhammadiyah” mengakui bahwa organisasi sebesar Muhammadiyah nampaknya tidak memiliki semangat dan semangat yang nyata dalam bidang dan urusan politik (Effendy, 2015).

Bachtiar Effendy juga menilai, yang harus diselesaikan Muhammadiyah sebelum merumuskan substansi keterlibatan Muhammadiyah dalam politik adalah membangun kesadaran kolektif bahwa politik sama mulianya dengan amal-amal Muhammadiyah lainnya, seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan yang selama ini menjadi inti gerakan. dalam bisnis amal. Berangkat dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kepedulian Muhammadiyah terhadap urusan politik masih atau belum menjadi prioritas, dibandingkan urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi (Effendy, 2015).

Politik memang penting dan menjadi urusan dunia, tetapi Muhammadiyah membaginya menjadi dua ranah. Ranah pertama adalah politik kenegaraan secara umum, dimana Muhammadiyah dapat menjalankan peran kebangsaan melalui opini, lobi, komunikasi, dan lain-lain, terutama bila ada hal-hal yang dianggap penting dan strategis terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang disebut peran politik nasional.

Ranah kedua adalah urusan politik kekuasaan untuk memperebutkan jabatan dalam pemerintahan yang harus dijalankan oleh partai politik. Jika ingin mempengaruhi kehidupan politik praktis, Anda dapat berpartisipasi dalam partai politik dan lembaga pemerintah melalui anggota atau kader. Selain itu, Muhammadiyah dapat berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan partai politik dalam memperjuangkan kepentingan organisasi, umat, dan bangsa sesuai dengan posisinya sebagai organisasi dakwah kemasyarakatan.

Kebijakan Muhammadiyah tentang pelarangan rangkap jabatan itu perlu dan tidak menunjukkan alergi atau anti politik. Setiap organisasi tetap membutuhkan koridor dengan pagar pembatas dan sistem yang mengatur sehingga Muhammadiyah agar tertib. Kalau semua serba bebas tanpa aturan, maka bisa terjadi masalah, Muhammadiyah akan seperti partai politik, dan juga akan banyak konflik kepentingan. Koridor ini tidak perlu diubah. Menurut Prof Din Syamsuddin, organisasi Islam lain yang dikenal ‘fleksibel’ dalam politik ingin meniru aturan ala Muhammadiyah.

Beberapa partai politik juga memiliki sistem dan koridor tertentu. Misalnya, ketika seorang ketua partai politik terpilih menjadi Ketua DPR RI, seseorang langsung dikeluarkan dari partai tersebut. Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki aturan bagi mereka yang terlibat dalam kontestasi politik untuk melepaskan diri. Maka wajar bila organisasi dakwah dan kemasyarakatan seperti Muhammadiyah memiliki aturan yang sama. Kebijakan khusus bersifat fleksibel dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, namun tetap diperlukan regulasi agar ada pagar pembatas dan regulator (Suara Muhammadiyah, 2021b).

Muhammadiyah, sebagaimana dijelaskan Nashir (2008), menetapkan kebijakan tentang larangan merangkap jabatan tertentu antara jabatan penting dalam organisasi dan jabatan penting dalam partai politik, selain merangkap jabatan dengan organisasi lain yang sejenis. Kebijakan Muhammadiyah tidak dimaksudkan untuk menghalangi, apalagi anti dan alergi, partisipasi aktif dalam politik praktis. Garis inilah yang meringkai gerakan Muhammadiyah agar tetap berada pada koridornya. Sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah sosial, bukan politik-praktis di ranah perebutan kekuasaan negara.

Menjaga koridor organisasi dalam artian Muhammadiyah harus menjadi organisasi yang konsisten yang selalu menumbuhkan harapan menjadi organisasi yang menggemakan panji dakwah Islam yang kuat dan murni demi perjuangan Islam yang tidak terhanyut. oleh kubu-kubu politik yang mengikis niat sesuai garis perjuangan (*Khittah*) Muhammadiyah.

Jika ingin berpolitik, silakan; namun, perlu dicatat bahwa berada di diaspora membutuhkan ketegasan dalam tujuan Anda. Anda harus bisa menebar kebaikan agar arus tidak tergerus dan redup dalam dinamika. Itulah konsekuensi memiliki diaspora untuk terus tegak di mana pun Anda berada, melintasi batas-batas Anda. Tetap teguh pada identitas, membumikan gerakan Muhammadiyah dengan cara lain, serta menjaga dan memajukan Muhammadiyah (Suara Muhammadiyah, 2021a).

Haedar Nashir, dalam tulisannya “Kompleksitas Relasi Muhammadiyah dan Politik”, menilai Muhammadiyah memiliki pemahaman yang sangat baik tentang isu-isu politik. Nah, ketika Prof. Amien Rais mengkategorikan urusan politik menjadi *low politic* rendah dan *high politic*. Muhammadiyah membagi persoalan politik menjadi dua, yaitu politik umum, yaitu urusan politik kebangsaan dan politik negara. Kemudian, politik, khususnya urusan politik, bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan (Nashir, 2015).

Nashir (2014), dalam bukunya, berikut kutipannya: “Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* dengan maksud dan tujuan tegaknya agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan, termasuk akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawi, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan individu maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan ini, Muhammadiyah dapat mengaktualisasikan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi *rahmatan lil 'alamin* dalam kehidupan di muka bumi ini”.

Aspek kebijakan moral ini dikenal sebagai politik asosiasi dan terdiri dari mempromosikan astronomi budaya Barat kepada orang Indonesia. Sekelompok intelektual yang secara tradisional menyembah Barat, dikelilingi oleh tradisi nenek moyang mereka, dan tidak menghormati Islam lahir dari pendidikan institusional. Mereka lebih akrab dengan ilmu pengetahuan dan budaya sekuler Barat, sehingga hal ini tampak wajar karena mereka tidak mengikuti pendidikan agama, konsumsi moral, atau semangat. Alfian (1989), dalam modernitas Islam dalam politik Indonesia, gerakan Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda tahun 1912 sampai 1942, menemukan bahwa bagi Muhammadiyah sebagai gerakan nonpolitik, keterlibatannya yang berbeda dengan organisasi lain menjadikan politik sebagai profesi. Posisi umat sama dengan posisi yang hendak mengancam dan menantang Islam di awal abad ke-20. Misalkan Muhammadiyah, sebuah organisasi non-politik, ingin memainkan peran politik yang terbuka dan tidak langsung, seperti SI (Partai Sarekat Islam), PII (Partai Islam Indonesia), Masyumi, dan Parmusi, berdasarkan situasi politik bangsa. Dalam hal itu, politik Muhammadiyah berjalan dan hidup sesuai dengan itu. Namun, Muhammadiyah telah menunjukkan dirinya sebagai kelompok kepentingan yang sadar sosial dan religius melalui berbagai jalur, termasuk politik terbuka pada waktu-waktu tertentu.

Alhasil, Muhammadiyah seolah memainkan tiga peran sebagai kekuatan politik yang membebani setiap pengaruh penguasa baru di lanskap politik. Bisa jadi keterpurukan Muhammadiyah dalam perpolitikan bangsa baru terjadi belakangan ini, apalagi mengingat puluhan tahun reformasi. Kebijakan tersebut dinyatakan final melalui paksaan. “Matahari terbit dan terbenam” dalam politik nasional kontemporer mengikuti definisi sempit ini. Namun, ada juga para aktivis dan masyarakat Indonesia yang memiliki pertanyaan: Semua pihak sepakat bahwa Muhammadiyah adalah salah satu pilar dan jangkar Republik Indonesia.

Peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan medan perjuangan. Pertama, melalui aktivitas politik yang berorientasi pada perebutan kekuasaan/negara (politik riil, politik praktis) seperti yang dilakukan oleh partai politik atau kekuatan politik formal pada level lembaga negara. Kedua, melalui kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan politik tidak langsung (*high politics*) mempengaruhi kebijakan negara dengan kekuatan moral untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan negara yang lebih baik sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan.

Muhammadiyah selalu terpenggil untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan garis besar perjuangan sebagai berikut (Kurniawan, 2022):

- 1) Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 2) Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun dimana nilai-nilai Ilahiyah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kebersamaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, keadaban untuk terwujudnya “*Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*”;
- 3) Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis;
- 4) Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya NKRI yang diproklamasikan tahun 1945;
- 5) Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara

- aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban;
- 6) Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban;
 - 7) Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus sesuai dengan tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara;
 - 8) Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab, akhlak mulia, keteladanan, dan perdamaian. Aktivitas politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi persyarikatan dalam melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*;
 - 9) Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis, dan berkeadaban".

Kalau forum kebijakan tidak ada kaitannya dengan konstitusi, kenapa harus di luar Muhammadiyah? Jawabannya, Muhammadiyah adalah kelompok kebijakan dan gerakan pembaharuan. Akibatnya, itu tidak boleh berafiliasi dengannya; bahkan jika ya, itu tidak akan menjadi partai politik. Namun jelas dan meyakinkan bahwa Muhammadiyah membutuhkan strategi politik dan budaya untuk mencapai dan merencanakan sesuai dengan lingkungannya. Muhammadiyah harus memperhatikan cara kerja politik dan bagaimana menugaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya sebagai organisasi yang terorganisir dan dinamis serta gerakan yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Muhammadiyah selalu didesak untuk melakukan perjuangan berbasis garis besar untuk memajukan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa bernegara dan usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara melalui perjuangan politik dan pembinaan masyarakat pada hakekatnya merupakan sarana kehidupan ketuhanan dimana nilai-nilai tertanam dan berkembang bersama dengan nilai-nilai yang dapat dibangun melalui keadilan dan kemanusiaan.

Model-model baru pemerintahan dan organisasi sosial diperkenalkan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai akibat dari dinamika perkembangan organisasi masyarakat sipil dan perubahan pemerintahan dan sistem. Peran, fungsi dan tanggung jawab organisasi masyarakat sipil yang bertanggung jawab untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan dan kedaulatan negara semakin dibutuhkan dengan semakin banyaknya organisasi masyarakat sipil, persebarannya dan jenis kegiatan yang dilakukan di kehidupan demokrasi. Standar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, peran dan fungsi organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan perlu ditingkatkan untuk membangun sistem tata kelola yang mengacu pada pedoman organisasi masyarakat sipil yang sehat.

Akibatnya, alih-alih mengandalkan hukum, dinamika dan kompleksitas masyarakat menuntut penataan dan struktur hukum yang lebih komprehensif.

Secara umum organisasi kepemudaan bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan, yang terpenting adalah mengajak seluruh pemuda untuk bersatu untuk satu tujuan, yaitu memajukan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu negara. Selain itu, organisasi kepemudaan bertujuan untuk mengembangkan potensi generasi muda agar dapat menjalankan, melatih dan mempersiapkan diri secara efektif. Berdasarkan kesamaan pendirian organisasi, maka setiap organisasi kepemudaan memiliki tujuan khusus untuk memajukan dan mengharumkan nama organisasi melalui berbagai kegiatan yang menjadikan keberadaan organisasi dirasakan oleh pemuda dan masyarakat luas, diprioritaskan, serta menjadi anggota organisasi. Untuk mendapatkan pengakuan atas isi dan tujuan organisasi. Pemuda diharapkan mampu berkomunikasi dan berkontribusi aktif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam organisasi kepemudaan. Di sisi lain, merupakan bagian dari masyarakat yang berpotensi mendukung kepentingan nasional. Sebelum mereka dapat hidup dalam masyarakat masa depan, beberapa pemuda yang berpotensi menjadi pemimpin, pengusaha dan pengusaha harus mendapatkan pelatihan, pemberdayaan, pengembangan dan kecocokan.

4. Kesimpulan

Dengan demikian Muhammadiyah dan politik tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah diperlukan dalam politik di Indonesia. Banyak dinamika dan peristiwa yang terjadi di bangsa ini dimana Muhammadiyah telah mengambil bagian dalam perjalanan pembangunan dan pembangunan negara Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah memegang peranan yang sangat penting dan sangat penting bagi bangsa Indonesia khususnya bagi kota Jakarta. Meskipun demikian, setidaknya berangkat dari berbagai rumusan dan pemikiran mengenai hubungan Muhammadiyah dengan politik, ketimbang tokoh-tokoh intelektual, Pemuda Muhammadiyah, menurut organisasi Muhammadiyah ideal tersebut, memilih untuk berjuang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui upaya membangun atau memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani, sekuat cita-cita Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islami secara ikhlas. Sementara itu, hal-hal yang terkait dengan kebijakan negara sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintah akan mengikutinya melalui pendekatan yang tepat dan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara demokrasi. Muhammadiyah di atas dapat dijadikan pandangan tentang hubungan Muhammadiyah dengan politik dan bagaimana seharusnya kader berpolitik.

Karena mengaturnya oleh lembaga formal negara dan partai politik, maka Muhammadiyah berperan penting dalam politik dan perjuangan politik yang menitikberatkan pada kekuasaan karena memberikan pedoman terbaik untuk membangun sistem politik yang demokratis dan beradab sesuai dengan cita-cita negara. Perjuangan politik yang kuat untuk kebijakan harus mengutamakan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi nilai-nilai mazhab, serta semangat aturan dan proklamasi Republik Indonesia tahun 1945. Pemuda Muhammadiyah harus lebih peka dan serius dalam aktivitasnya dan memahami ilmu politik dan hukum untuk mempersiapkan dinamika politik, hukum, dan organisasi yang muncul di Indonesia.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

6. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Alfian. (1989). *Muhammadiyah: the political behavior of a Muslim modernist organization under Dutch colonialism*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, B. (2015). Keharusan Tajdid Politik Muhammadiyah. In *Ijtihad Politik Muhammadiyah* (pp. 11–28). Pustaka Pelajar.
- Jainuri, A. (2015). Budaya Politik Muhammadiyah. In *Ijtihad Politik Muhammadiyah* (pp. 73–84). Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, H. A. (2022, March 7). *Muhammadiyah dan Politik*. Gerakan Dakwah Pencerahan. <https://muhammadiyahponorogo.or.id/muhammadiyah-dan-politik/>
- Maarif, A. S. (2015). Teologi Politik Muhammadiyah. In *Ijtihad Politik Muhammadiyah* (pp. 1–9). Pustaka Pelajar.
- Nashir, H. (2008). *Khittah muhammadiyah tentang politik*. Yogyakarta, Indonesia: Suara Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2014). *Memahami Ideologi Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2015). Kompleksitas Relasi Muhammadiyah dan Politik. In *Ijtihad Politik Muhammadiyah* (pp. 105–149). Pustaka Pelajar.
- Shobron, S. (2003). *Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam pentas politik nasional*. Surakarta, Indonesia: Surakarta Muhammadiyah University Press.
- Suara Muhammadiyah. (2021a, January 25). *Politik Muhammadiyah dan Gerakan Lain*. <https://suaramuhammadiyah.id/2021/01/25/politik-muhammadiyah-dan-gerakan-lain/>
- Suara Muhammadiyah. (2021b, February 9). *Muhammadiyah Positif tentang Politik*. <https://suaramuhammadiyah.id/2021/02/09/muhammadiyah-positif-tentang-politik/>

Tentang Penulis

1. **Abdur Rahim** adalah Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.
Email: abdur.rahim@student.umj.ac.id
2. **Ma'mun Murod Al-Barbasy** memperoleh gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2016. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.
Email: mamunmurod73@gmail.com

3. **Andy Hermansyah** adalah Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.
Email: andi.hermansyah@student.umj.ac.id

4. **Zainal Muksin** adalah Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia.
Email: zainal.muksin@student.umj.ac.id